

Kolaborasi Antar Aktor dalam Penyediaan Layanan Publik di Kota Malang: Studi pada Layanan *Job Fair Active Learning*

Aerio Galih Devano¹, Maya Mulya Lusiana², Zafira Aulia³, Ferdian Adyatma⁴, Viola Vinna Wandini⁵,
Prisca Kiki Wulandari⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

Corresponding Author: Aerio Galih Devano, E-Mail: aeriosukses@student.ub.ac.id

Published: June, 2025

ABSTRAK

Kota Malang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan di Jawa Timur menghadapi tantangan serius dalam menyediakan akses ketenagakerjaan yang merata dan efisien. Melonjaknya angka pengangguran mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi inovatif dalam pelayanan publik, salah satunya melalui platform digital *Job Fair Active*. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana jejaring kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi terbentuk serta berfungsi dalam penyelenggaraan layanan ketenagakerjaan berbasis digital tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dimana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara *purposive*, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan, laporan program, dan data ketenagakerjaan. Pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap dinamika kolaborasi lintas sektor dalam tata kelola layanan publik yang adaptif dan partisipatif, serta memberikan pemahaman mengenai implementasi teori *policy network* dalam konteks pelayanan ketenagakerjaan di tingkat daerah.

Kata Kunci: kolaborasi, layanan publik, *job fair active*, pemerintah daerah, jejaring pemerintah

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Kota Malang, yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan di Jawa Timur dalam hal ekonomi, pendidikan, dan budaya, memiliki kompleksitas dalam struktur sosialnya. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat serta jumlah lulusan dari perguruan tinggi yang terus bertambah setiap tahun, tantangan dalam menciptakan lapangan kerja menjadi cukup besar. Data dari Pemerintah Kota Malang menunjukkan bahwa pada tahun 2021, data dari pemerintah Kota Malang sekitar 46.542 orang tercatat sebagai pengangguran. Angka ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pertumbuhan populasi yang sudah siap bekerja dan penyediaan pekerjaan yang sesuai, terampil, serta mudah diakses. Dalam hal ini, peran layanan publik, terutama yang terkait dengan penempatan kerja, menjadi sangat krusial (MalangKota 2022).

Meskipun pemerintah daerah secara rutin melaksanakan bursa kerja secara langsung yang memberikan dampak positif, acara tersebut mendapatkan berbagai tantangan. Keterbatasan dalam biaya operasional yang tinggi, kurangnya peserta karena faktor lokasi dan kondisi fisik. Dengan demikian, pemerintah daerah secara rutin melaksanakan bursa kerja secara langsung yang memberikan dampak

positif, acara tersebut seringkali menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan biaya operasional, rendahnya partisipasi akibat faktor lokasi dan kondisi fisik, serta proses seleksi yang tidak efisien menjadi hambatan utama. Menurut OECD (2023), transformasi digital dalam pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan responsivitas dan keandalan sektor publik melalui layanan yang lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang menggabungkan teknologi informasi dan pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan layanan publik.

Menanggapi tantangan tersebut, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), bekerja sama dengan sektor swasta dan akademisi, meluncurkan platform digital bernama *Job Fair Active*. Platform ini dirancang untuk memfasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja dalam satu sistem yang efisien, fleksibel, dan terjangkau. Inisiatif ini sejalan dengan tren global di mana pemerintah memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat inovasi di berbagai bidang layanan publik (OECD, 2023). Dengan dukungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, aplikasi ini memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan yang semakin melek teknologi digital serta mendukung dinamika bisnis yang cepat berubah dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Job Fair Active tidak hanya mendigitalisasi bursa kerja tradisional, tetapi juga merupakan contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menyediakan layanan publik yang lebih responsif. Pemberi kerja dapat mengiklankan lowongan tanpa biaya, sementara pencari kerja dapat melamar tanpa harus mencetak dokumen atau hadir secara fisik. Proses penyaringan awal dapat dilakukan melalui fitur interaksi *online*, mempercepat proses rekrutmen dan menciptakan efisiensi dalam waktu, tenaga, dan biaya bagi semua pihak. Hal ini mencerminkan pentingnya tata kelola digital dalam memberdayakan layanan publik untuk meningkatkan kepercayaan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Mittal, 2024).

Analisis terhadap jaringan kolaboratif juga penting untuk memahami bagaimana pemerintah lokal membangun kemitraan strategis dengan entitas non pemerintah dalam memberikan layanan publik yang inovatif. Dalam pendekatan pemerintahan modern, pemerintah berperan tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Kolaborasi semacam ini krusial untuk menciptakan pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan berorientasi pada hasil (Ciancarini et al., 2023).

Studi kasus mengenai layanan *Job Fair Active* di Kota Malang memberikan contoh nyata tentang pengembangan kebijakan publik melalui jaringan yang melibatkan banyak aktor secara efektif. Dengan melihat dinamika, fungsi, dan cara interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan pihak akademik dalam pelaksanaan layanan ini, diharapkan bisa ditemukan praktik-praktik terbaik yang bisa diterapkan di tempat lain.

Perspektif Jaringan

Konsep jaringan atau *network* menjadi topik yang banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pemerintah, ilmuwan (baik dari ilmu sosial maupun ilmu alam), praktisi bisnis, hingga masyarakat umum. Pada ilmu politik, istilah “jaringan” sering digunakan oleh politisi dan akademisi untuk menggambarkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dari latar belakang yang berbeda dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan politik, yang biasa disebut dengan kebijakan publik. Teori jaringan dapat diterapkan dalam berbagai tahap kebijakan, seperti proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pelayanan publik. Tujuannya adalah agar pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi lebih efektif dan efisien melalui penggunaan sumber daya bersama (*sharing resources*). Pemanfaatan sumber daya secara kolaboratif ini umumnya hanya bisa dilakukan dalam organisasi yang berbasis jaringan. Sifat jaringan yang fleksibel dan terbuka ini memungkinkan terjadinya kerja sama lintas aktor, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih maksimal dalam mencapai tujuan organisasi, termasuk dalam merumuskan kebijakan publik.

Jaringan Kebijakan Kolaborasi

Menghadapi tantangan kebijakan publik yang semakin kompleks, pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan satu institusi pemerintah tidak lagi cukup. Permasalahan publik seperti pengangguran, kemiskinan, perubahan iklim, dan pelayanan publik memerlukan keterlibatan berbagai pihak dengan sumber daya dan perspektif yang berbeda. Konsep *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif menjadi sangat relevan. *Collaborative governance* merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aktor dari sektor publik, sektor swasta, serta masyarakat sipil untuk bersama-sama merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan. Kolaborasi dilakukan melalui suatu jaringan atau *network* yang saling berinteraksi dan berbagi sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Model tersebut berbeda dengan pendekatan birokratik tradisional yang cenderung bersifat hierarkis dan tertutup. Pada *collaborative governance*, proses pengambilan keputusan bersifat lebih partisipatif, terbuka, dan fleksibel. Salah satu pendekatan teoritis yang relevan untuk memahami proses ini adalah teori *policy network* atau teori jaringan kebijakan. Teori menawarkan cara pandang bahwa kebijakan publik tidak lagi dirumuskan secara linear oleh pemerintah, melainkan melalui interaksi antara berbagai aktor dalam jaringan yang saling berinterdependensi. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori ini adalah Frans Van Waarden (1992), yang menjabarkan tujuh dimensi penting dalam analisis jaringan kebijakan.

Dimensi pertama dalam analisis jaringan kebijakan adalah *actors* (aktor), yaitu individu atau organisasi yang terlibat dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan. Jumlah dan keberagaman aktor yang terlibat akan mempengaruhi karakter dan kompleksitas jaringan yang terbentuk. Aktor-aktor tersebut bisa berasal dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi non pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, serta kelompok masyarakat sipil. Dimensi kedua adalah *function* (fungsi) yang

setiap jaringan memiliki fungsi yang berbeda tergantung pada tujuan dibentuknya. Fungsi utama dari jaringan kebijakan adalah menjadi wahana komunikasi dan koordinasi antar aktor untuk menyampaikan kepentingan, berbagi informasi, serta merumuskan strategi bersama. Fungsi tersebut mencerminkan bagaimana aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan kolektif. Jaringan kebijakan memungkinkan terjadinya dialog antar sektor, pertukaran ide, serta penyelarasan strategi. *Structure* (struktur) dimensi ketiga yang di mana jaringan merujuk pada pola hubungan antar aktor dalam jaringan tersebut. Struktur dapat berbentuk horizontal (egaliter), vertikal (hierarkis), atau campuran dari keduanya. Struktur juga mencakup sejauh mana hubungan antar aktor bersifat formal atau informal. Struktur jaringan sangat mempengaruhi efektivitas kerja sama. Pada jaringan yang lebih terbuka dan inklusif, informasi cenderung mengalir lebih cepat dan aktor-aktor memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi. Sebaliknya, struktur yang terlalu hirarkis bisa menghambat inovasi karena pembagian peran yang terlalu kaku.

Dimensi keempat adalah *institutionalization* (pelembagaan), yaitu pelembagaan mengacu pada tingkat stabilitas dan formalitas suatu jaringan. Semakin terlembaga suatu jaringan, maka semakin besar pula kemampuannya untuk bertahan dalam jangka panjang dan menjalankan fungsinya secara konsisten. Pelembagaan ditunjukkan melalui adanya prosedur tetap, kesepakatan kerja sama, mekanisme evaluasi, serta pembagian peran yang jelas. Pelembagaan juga berkontribusi terhadap legitimasi jaringan di mata publik. *Rules of conduct* (aturan bertindak) merupakan dimensi kelima yang di mana jaringan kebijakan tidak bisa berjalan tanpa adanya aturan main yang mengatur interaksi antar aktor. Aturan ini bisa bersifat formal (dalam bentuk regulasi atau MoU) maupun informal (berupa norma, kebiasaan, atau etika kerja). Aturan main penting untuk mencegah konflik, mengatur pembagian sumber daya, dan menjamin transparansi dalam pengambilan keputusan. Kemudian *power relations* (hubungan kekuasaan) salah satu aspek penting dalam jaringan kebijakan adalah bagaimana kekuasaan dan sumber daya didistribusikan diantara aktor-aktor yang terlibat. Tidak semua aktor memiliki pengaruh yang sama. Ada yang memiliki kekuasaan lebih karena sumber daya, keahlian, atau posisi strategis dalam jaringan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika kekuasaan agar jaringan tidak dikuasai oleh segelintir aktor saja. Keseimbangan kekuasaan menjadi kunci dalam menjamin partisipasi yang setara dan menghindari dominasi satu pihak terhadap yang lain.

Actor strategies (strategi aktor) merupakan dimensi terakhir yang artinya dalam jaringan tidak bertindak pasif, melainkan memiliki strategi untuk mencapai tujuan mereka. Mereka membangun aliansi, melakukan negosiasi, serta memanfaatkan informasi dan sumber daya untuk memperkuat posisinya dalam jaringan. Strategi tersebut seringkali bersifat adaptif, tergantung pada konteks dan dinamika yang berkembang. Konsep *collaborative governance* dan teori *policy network* memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan publik seharusnya dirancang dan diimplementasikan di era kompleksitas dan ketidakpastian saat ini. Pendekatan kolaboratif tidak hanya berbicara tentang kerja sama antar lembaga, tetapi menekankan pentingnya membangun jaringan yang inklusif, adaptif, dan

berkelanjutan. Partisipasi berbagai aktor, baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dengan menggunakan tujuh dimensi jaringan kebijakan menurut Frans Van Waarden, dapat dilihat bahwa efektivitas kolaborasi sangat ditentukan oleh kualitas interaksi antar aktor, kejelasan struktur, aturan main yang disepakati bersama, hingga strategi dan distribusi kekuasaan di dalam jaringan. Jejaring yang terbangun tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai platform koordinasi, pertukaran sumber daya, dan inovasi bersama. Seiring dengan tantangan pembangunan yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor bukan lagi sekadar alternatif, tetapi menjadi kebutuhan mendasar. Hanya dengan membangun jaringan kebijakan yang solid dan berorientasi pada solusi, pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan dapat benar-benar diwujudkan.

Teori jaringan kebijakan dipilih karena mampu menjelaskan proses kebijakan publik yang kompleks dan melibatkan banyak aktor dari berbagai sektor, seperti pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat sipil. Teori ini menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor agar kebijakan bisa lebih efektif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan. Keunggulan utama teori ini adalah kemampuannya mendorong kolaborasi dan berbagi sumber daya antar aktor. Struktur jaringan yang terbuka juga memudahkan komunikasi, mempercepat inovasi, dan membantu organisasi mengatasi keterbatasan sumber daya. Namun, teori ini juga memiliki kelemahan, seperti ketimpangan kekuasaan antar aktor dan potensi konflik karena banyaknya pihak yang terlibat. Koordinasi bisa menjadi rumit jika tidak ada aturan yang jelas atau pelembagaan yang kuat. Teori tetap relevan karena mampu menggambarkan secara rinci bagaimana kebijakan dirancang dan dijalankan melalui interaksi antar aktor. Dengan tujuh dimensi dari Frans Van Waarden, teori ini menjadi alat analisis yang kuat untuk memahami dinamika kebijakan kolaboratif di era sekarang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, guna menganalisis secara mendalam dinamika kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik melalui platform *Job Fair Active* di Kota Malang tahun 2025. Pendekatan ini dipilih karena dapat menggambarkan realitas sosial secara kontekstual dan interpretatif (Hadi, I. P. 2021), memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif perspektif aktor-aktor kunci, termasuk strategi, motivasi, serta pola interaksi mereka dalam jaringan kerja sama lintas sektor.

Fokus penelitian diarahkan pada fenomena spesifik dalam layanan publik, yakni penyelenggaraan *Job Fair Active* sebagai inovasi kolaboratif antara pemerintah daerah dengan mitra swasta di bidang ketenagakerjaan. Pendekatan studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pola jejaring kebijakan serta praktik kolaboratif yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi, melainkan untuk memahami proses-proses sosial yang bersifat

unik, termasuk dinamika koordinasi dan pelibatan aktor lintas sektor dalam konteks pelayanan publik digital di tingkat lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan *Job Fair Active*, mencakup kegiatan daring serta forum-forum koordinasi antar instansi dan sektor terkait. Observasi ini berfungsi untuk mengidentifikasi pola interaksi, komunikasi, serta dinamika implementasi program, termasuk mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan. Selain observasi, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan yang diwawancarai terdiri dari pejabat Dinas Tenaga Kerja Kota Malang dan perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang yang memiliki peran langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan *Job Fair Active*. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap proses kolaboratif yang berlangsung.

Untuk menganalisis data hasil wawancara dan observasi, penelitian ini menggunakan analisis tematik. Data hasil wawancara ditranskrip secara verbatim, kemudian dilakukan proses open coding untuk mengidentifikasi kategori dan tema-tema awal. Proses ini dilanjutkan dengan *axial coding* guna menghubungkan berbagai tema yang muncul dengan kerangka teoritis yang digunakan, khususnya dimensi-dimensi jejaring kebijakan menurut Frans Van Waarden, yakni aktor, fungsi, struktur, kelembagaan, aturan bertindak, relasi kekuasaan, dan strategi aktor (Rozali, Y. A. 2022). Pendekatan tematik ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana interaksi antar aktor terbentuk, bagaimana strategi dijalankan, serta bagaimana relasi kekuasaan mempengaruhi proses kolaborasi dalam penyelenggaraan layanan publik digital.

Analisis dilakukan secara komprehensif, dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan institusional dari masing-masing aktor yang terlibat. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan “apa” yang terjadi dalam jejaring kolaboratif tersebut, tetapi juga “bagaimana” dan “mengapa” proses tersebut berlangsung. Hal ini sejalan dengan tujuan utama penelitian untuk menyajikan gambaran utuh mengenai kolaborasi lintas sektor dalam layanan publik digital serta memberikan masukan bagi perumusan kebijakan inovatif dan responsif di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat menguraikan tentang konsep *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif, yang melibatkan tiga aktor utama, yaitu pemerintah, swasta, akademisi dalam penyediaan pelayanan publik Kota Malang pada layanan *Job Fair Active Learning*. Hasil observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kolaborasi antar aktor dalam layanan *Job Fair Active Learning* berlangsung melalui pendekatan multi *stakeholder collaboration*. Setiap aktor memainkan peran penting dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Kolaborasi ini tidak bersifat hierarkis, melainkan lebih ke arah partisipatif dan berbasis kepentingan bersama (*shared*

goals). Disnaker menjadi aktor utama yang memfasilitasi dan mengkoordinasikan jalannya program. Pemerintah menyediakan infrastruktur, regulasi, serta menjembatani komunikasi antar aktor. Selain itu, pemerintah juga bertindak sebagai penjamin keberlangsungan program melalui pendanaan dan penyediaan SDM aparatur.

a. Peran Aktor Pemerintah dalam Layanan *Job Fair Active Learning*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Disnaker dan Diskominfo Kota Malang, pemerintah memiliki peran strategis yang sangat penting. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan kebijakan dan standar pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana, serta menjembatani kerja sama antara institusi pendidikan, perusahaan, dan lembaga pelatihan. Pemerintah juga berperan sebagai inisiator yang menggagas program ini sebagai bagian dari upaya pengurangan pengangguran, serta sebagai kolaborator yang memperkuat sinergi lintas sektor. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab sebagai evaluator untuk menilai efektivitas program, memastikan kegiatan tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi pencari kerja. Dengan peran-peran tersebut, kehadiran pemerintah sangat krusial dalam menjamin keberlanjutan dan kualitas layanan *Job Fair Active Learning*.

Dalam layanan *Job Fair Active Learning*, Diskominfo dan Disnaker memiliki peran yang saling melengkapi untuk mendukung keberhasilan program. Disnaker berperan utama sebagai penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan. Mereka bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan *job fair*, menjalin kerja sama dengan perusahaan penyedia lowongan kerja, menyusun materi pelatihan yang relevan, serta memastikan kegiatan *active learning* seperti pelatihan keterampilan, simulasi wawancara, dan mentoring berjalan efektif. Selain itu, Disnaker juga berfungsi sebagai jembatan antara pencari kerja dan industri, sekaligus sebagai evaluator untuk mengukur dampak kegiatan terhadap penyerapan tenaga kerja.

"Kami bekerja sama dengan Diskominfo dan beberapa perusahaan dalam pelaksanaan Job Fair Active Learning ini. Disnaker berperan sebagai koordinator konten, artinya kami yang menyusun materi pelatihan, jadwal kegiatan, dan kerja sama dengan pihak perusahaan." Wawancara dengan Ibu Wiwik Wijayanti, Kepala Sub Bidang Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana, Disnaker Kota Malang pada 29 April 2025.

Sementara itu, Diskominfo berperan dalam aspek publikasi, penyebaran informasi, dan digitalisasi layanan. Mereka mendukung promosi *job fair* melalui berbagai platform digital dan media sosial, memastikan masyarakat luas mendapatkan informasi secara cepat dan merata. Diskominfo juga bisa menyediakan infrastruktur teknologi, seperti sistem pendaftaran *online*, *live streaming* pelatihan, atau aplikasi pendukung *job fair* berbasis digital. Dengan dukungan dari Diskominfo, layanan *job fair* menjadi lebih terbuka, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama generasi muda yang akrab dengan teknologi. Kolaborasi antara Disnaker dan Diskominfo ini sangat penting untuk menciptakan layanan *job fair* yang efektif, informatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kami dari Diskominfo membantu dari sisi teknis, khususnya dalam pengembangan sistem, pengelolaan server, dan keamanan data. Jadi, semua infrastruktur digital untuk mendukung pelaksanaan Job Fair Active Learning kami siapkan dan pantau secara berkala. Komunikasi dengan Disnaker juga berlangsung intens karena kami harus memastikan bahwa platform berjalan dengan lancar, stabil, dan aman digunakan oleh masyarakat. Selain itu, kami juga mendukung dalam hal publikasi digital agar informasi terkait job fair bisa tersebar luas dan mudah diakses.”

Wawancara dengan Bapak Nugroho, Sub Koordinator Aplikasi dan Informatika, Diskominfo Kota Malang pada 5 Mei 2025.

b. Peran Sektor Swasta dalam Layanan *Job Fair Active Malang*

Sektor swasta merupakan salah satu aktor kunci dalam pelaksanaan *Job Fair Active* di Kota Malang. Dalam jejaring kolaboratif ini, perusahaan-perusahaan berperan sebagai penyedia informasi lowongan kerja, yang menjadi konten utama dari platform digital tersebut. Keterlibatan sektor swasta diperlukan agar platform tidak hanya menjadi sarana informasi pasif, tetapi benar-benar memberikan manfaat praktis bagi pencari kerja yang mengakses layanan tersebut secara daring. Namun demikian, pelibatan sektor swasta tidak sepenuhnya berjalan mulus. Dari hasil wawancara dengan Ibu Wiwik Wijayanti, Kepala Sub Bidang Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Disnaker Kota Malang, terungkap bahwa masih terdapat tantangan besar dalam memastikan kesiapan teknis perusahaan-perusahaan mitra.

“Tantangan utamanya itu kadang perusahaan belum siap input data sendiri. Jadi harus kami bantu. Misalnya, ada perusahaan yang tidak tahu bagaimana format unggah lowongan atau tidak memiliki staf IT yang bisa menangani input secara cepat. Akhirnya, kami dari Disnaker harus melakukan pendampingan, bahkan kadang menginput sendiri datanya satu per satu agar tetap muncul di platform. Kalau kami biarkan, nanti malah lowongannya kosong dan pencari kerja tidak menemukan informasi. Padahal keterlibatan mereka penting untuk menjaga keberlanjutan layanan ini.”

Wawancara dengan Ibu Wiwik Wijayanti, S Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Disnaker Kota Malang, pada 29 April 2025.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Disnaker tidak hanya berperan sebagai pengelola platform, tetapi juga menjadi fasilitator teknis bagi sektor swasta yang belum sepenuhnya siap menghadapi sistem digital. Masalah kesiapan sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan, terutama yang kecil atau menengah, menjadi salah satu kendala yang membuat proses digitalisasi layanan publik ini tidak sepenuhnya berjalan secara mandiri oleh semua pihak. Kontribusi sektor swasta tetap penting. Tanpa keterlibatan mereka, platform *Job Fair Active* tidak akan memiliki konten yang relevan, karena hanya merekalah yang dapat menyediakan peluang kerja secara riil. Perusahaan juga mendapatkan manfaat dari kolaborasi ini, karena proses rekrutmen menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan mampu menjangkau lebih banyak pelamar dibandingkan metode konvensional.

Selain itu, perusahaan juga terlibat dalam forum-forum koordinasi yang diselenggarakan secara rutin oleh Disnaker, terutama menjelang pelaksanaan event besar. Komunikasi intensif seperti melalui grup

WhatsApp dan rapat koordinasi mingguan juga melibatkan pihak swasta agar mereka tetap terinformasikan dan berpartisipasi aktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran sektor swasta dalam *Job Fair Active* bersifat strategis namun masih bergantung pada fasilitasi pemerintah. Perlu adanya peningkatan kapasitas teknologi dan manajemen informasi di lingkungan perusahaan mitra agar jejaring kolaboratif ini dapat lebih optimal. Dalam kolaborasi lintas sektor, kesiapan dan dukungan antar aktor menjadi syarat mutlak untuk mencapai pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan.

c. Peran Akademisi dalam Layanan *Job Fair Active Learning*

Akademisi dari FILKOM UB memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan layanan *Job Fair Active Learning*, khususnya dalam aspek keilmuan dan pengembangan teknologi. Akademisi FILKOM UB, melalui sosok Herman Tolle, berperan dalam pengembangan sistem digital yang menjadi dasar aplikasi. Mereka membantu menciptakan sistem yang memungkinkan pencari kerja untuk mengisi data dan menjalani assessment *soft skill* secara otomatis melalui semacam tes psikologi yang terdiri dari sekitar 100 soal. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memetakan kemampuan pelamar dan mencocokkannya secara otomatis dengan kebutuhan dari perusahaan.

Akademisi juga membantu menciptakan sistem rekomendasi digital, dimana perusahaan tidak lagi perlu memasang iklan lowongan. Sistem akan secara otomatis mencocokkan pelamar dengan lowongan yang sesuai, lalu memberikan daftar kandidat potensial kepada perusahaan. Hal ini memungkinkan proses seleksi awal dilakukan secara efisien tanpa intervensi manual. selanjutnya juga berperan dalam pengolahan data dan pemetaan kebutuhan pelatihan, terutama bagi pencari kerja yang belum memenuhi kriteria tertentu. Dari hasil penilaian *soft skill*, dapat diidentifikasi aspek-aspek yang masih lemah sehingga kedepannya bisa dijadikan dasar pengembangan pelatihan lebih lanjut.

Dengan keikutsertaan Herman Tolle dalam Dewan *Smart City* Kota Malang, peran akademisi tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga masuk dalam penyusunan kebijakan strategis digital kota, termasuk integrasi aplikasi ini dengan pelayanan publik lainnya. Dengan berbagai peran tersebut, akademisi FILKOM UB bukan hanya sekadar mitra teknis, tetapi juga aktor intelektual yang mendorong transformasi digital dalam layanan ketenagakerjaan, memperkuat konsep *active learning* dan efisiensi sistem perekrutan kerja di Kota Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan *Job Fair Active* Kota Malang merupakan hasil kolaborasi antara Disnaker dan Diskominfo yang diluncurkan pada masa pandemi COVID-19. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan akses terhadap informasi ketenagakerjaan secara daring ketika mobilitas masyarakat terbatas. Menurut Bapak Arif dari Disnaker, platform ini dikembangkan sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi pandemi agar proses rekrutmen kerja tetap berjalan. Sementara itu, Bapak Nugroho dari Diskominfo menjelaskan bahwa peran institusinya lebih kepada pengembangan teknis dan dukungan sistem teknologi informasi. Kerja sama antara dua instansi ini melibatkan koordinasi

rutin, termasuk pertemuan mingguan serta komunikasi cepat melalui grup *WhatsApp*, terutama menjelang pelaksanaan event besar. Disnaker bertanggung jawab atas isi dan kurasi lowongan kerja, sedangkan Diskominfo mengelola aspek teknis dan infrastruktur digital. Kolaborasi ini juga melibatkan pihak swasta sebagai penyedia informasi lowongan, meskipun diakui masih terdapat tantangan, seperti rendahnya kesiapan perusahaan untuk mengunggah data secara mandiri.

Dari sisi teknologi, platform *Job Fair Active* berbasis web sederhana namun fungsional, dibangun menggunakan server lokal dengan kemampuan integrasi melalui API. Evaluasi terhadap program dilakukan secara berkala oleh Disnaker melalui rekapitulasi data pengguna dan pencapaian kerja, sementara Diskominfo menyelenggarakan survei daring untuk pengguna meskipun partisipasinya masih terbatas. Namun, program ini telah dihentikan akibat kebijakan dari pemerintah pusat yang melarang daerah mengembangkan aplikasi sejenis secara mandiri. Keduanya menyatakan bahwa pengalihan ke aplikasi nasional telah dilakukan demi integrasi sistem dan efisiensi layanan digital. Aplikasi *Job Fair Active Learning* yang sebelumnya dikembangkan sebagai hasil kolaborasi antara Pemkot Malang dan akademisi FILKOM UB kini sudah tidak lagi digunakan. Saat ini, layanan informasi lowongan kerja dan proses rekrutmen tenaga kerja di Kota Malang telah terpusat pada aplikasi resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu “Karirhub” dan “SIAPkerja”, yang menyediakan sistem terintegrasi secara nasional untuk pencari kerja dan perusahaan. Sebagai tindak lanjut, Disnaker berfokus pada peningkatan pelatihan keterampilan digital bagi pencari kerja, sedangkan Diskominfo mengalihkan sumber dayanya untuk mendukung layanan digital terintegrasi sesuai arahan nasional.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Nugroho dari Disnaker, aplikasi *Job Fair Active* yang dimiliki Kota Malang awalnya diluncurkan dan difungsikan selama masa pandemi COVID-19, yaitu sekitar tahun 2019 hingga 2023. Aplikasi ini dibuat sebagai respons terhadap keterbatasan aktivitas fisik selama pandemi, sehingga proses perekrutan kerja dapat tetap berjalan secara daring dan efisien. Namun, saat ini aplikasi tersebut sudah tidak lagi berfungsi. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat yang mengatur bahwa setiap provinsi atau daerah tidak diperbolehkan mengembangkan aplikasi tersendiri untuk keperluan sejenis. Sebagai gantinya, seluruh kegiatan yang sebelumnya difasilitasi oleh aplikasi daerah kini dialihkan ke dalam satu aplikasi terintegrasi yang dikembangkan langsung oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem, meningkatkan efisiensi layanan digital, serta memudahkan pengawasan dan integrasi data secara nasional.

Perubahan kebijakan ini tentu membawa dampak yang signifikan terhadap pengelolaan layanan digital di tingkat daerah, termasuk bagi Kota Malang. Menurut Bapak Nugroho, meskipun aplikasi *Job Fair Active* dinilai cukup efektif selama masa penggunaannya karena mampu menjembatani pencari kerja dan perusahaan secara daring pemerintah daerah harus beradaptasi dengan kebijakan baru yang menuntut sentralisasi layanan. Hal ini mengharuskan Diskominfo Kota Malang untuk melakukan penyesuaian, baik

dari segi teknis maupun administratif. Di satu sisi, mereka harus menghentikan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi lokal yang telah ada. Di sisi lain, mereka juga dituntut untuk memastikan proses transisi menuju platform pusat berjalan lancar, termasuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha agar dapat menggunakan sistem baru secara optimal. Meskipun menghadirkan tantangan, Bapak Nugroho menyampaikan bahwa kebijakan ini juga membuka peluang bagi daerah untuk berfokus pada penguatan infrastruktur dan kapasitas digital yang mendukung integrasi sistem nasional, sehingga layanan publik dapat menjadi lebih terpadu, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bapak Nugroho juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan digital semacam ini. Kemudian menyebut bahwa meskipun tujuan integrasi sistem secara nasional adalah hal yang positif, namun pendekatan pelaksanaannya perlu memperhatikan kondisi dan kesiapan tiap daerah. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur digital yang merata atau sumber daya manusia yang memadai untuk langsung beradaptasi dengan sistem baru. Oleh karena itu, diperlukan adanya pelatihan dan pendampingan dari pemerintah pusat agar daerah tidak hanya menjadi pelaksana pasif, tetapi juga memiliki peran aktif dalam pengelolaan dan optimalisasi platform digital yang digunakan. Ia juga berharap agar masukan dari pemerintah daerah tetap diperhatikan dalam pengembangan sistem terpusat, sehingga fitur-fitur yang telah terbukti efektif di tingkat lokal, seperti yang ada dalam aplikasi *Job Fair Active*, dapat diakomodasi dalam platform nasional. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan layanan serta memastikan bahwa kebutuhan masyarakat lokal tetap dapat terpenuhi secara optimal dalam kerangka sistem yang lebih besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan *Job Fair Active Learning* di Kota Malang merupakan contoh nyata dari penerapan konsep *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif dalam penyediaan layanan publik. Kolaborasi ini melibatkan tiga aktor utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan akademisi, yang bekerja bersama secara partisipatif dengan tujuan memperluas akses ketenagakerjaan secara daring, terutama sebagai respons terhadap kondisi pandemi COVID-19. Pemerintah, dalam hal ini Disnaker dan Diskominfo Kota Malang, memegang peran sentral dalam memfasilitasi kolaborasi, mengembangkan aspek teknis, serta mengelola operasional layanan. Sektor swasta turut berperan melalui penyediaan informasi lowongan kerja dan keterlibatan dalam proses rekrutmen, meskipun masih terdapat tantangan terkait kesiapan teknis. Akademisi, khususnya dari FILKOM UB, mendukung inisiatif ini dari sisi keilmuan dan pengembangan awal platform. Meskipun platform ini telah menunjukkan manfaat signifikan dan melalui proses evaluasi yang rutin, implementasinya harus dihentikan akibat adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang menyeragamkan layanan digital ketenagakerjaan ke dalam sistem nasional. Kota Malang pun

telah beradaptasi dengan perubahan ini melalui pengalihan layanan ke aplikasi Karirhub dan SIAPkerja, serta memfokuskan sumber daya pada program pelatihan keterampilan digital dan integrasi sistem nasional. Kolaborasi lintas sektor yang dibangun melalui *Job Fair Active* mencerminkan pentingnya jejaring kebijakan dalam meningkatkan efektivitas layanan publik berbasis digital di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ciancarini, P., Giancarlo, R., & Grimaudo, G. (2023). Digital Transformation in the Public Administrations: A Guided Tour For Computer Scientists.
- Hadi, I. P. (2021). Penelitian Media Kualitatif-Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada. (n.d.).
- MalangKota. (2022). Tekan Pengangguran, Pemkot Malang Luncurkan Aplikasi Job Fair Active. <https://malangkota.go.id/2022/04/06/tekan-pengangguran-pemkot-malang-luncurkan-aplikasi-job-fair-active/>
- Mittal, A. (2024). The Vital Role of Digital Governance in Empowering Public Services.
- OECD. (2023). 2023 OECD Digital Government Index.
- OECD. (2023). Global Trends in Government Innovation 2023.
- Rozali, Y. A. (2022, January). Penggunaan analisis konten dan analisis tematik. In Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah (Vol. 19, p. 68). (n.d.).
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Gianyar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(1), 1-23. (n.d.).